

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun)**

Chyndi Marya Girsang[✉], Melanthon Rumapea, Dinita H. P. Purba, Arthur Simanjuntak

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia

Email: girsangchyndi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/siakun.V2N1.H59-69>

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the performance of village government officials and village financial management on the implementation of good governance in villages in Silimakuta District, Simalungun Regency. The type of data used in this research is descriptive research with quantitative methodology. The research was conducted in 6 villages in Silimakuta District. The sample for this research consisted of 45 respondents who were all village officials. The results in this study found that: (1) The performance of the Village Government Apparatus has a positive significant impact on the implementation of Good Governance, (2) Village Financial Management has a positive significant impact on the implementation of Good Governance, (3) The performance of the Village Government Apparatus and Village Financial Management simultaneously has a positive significant impact on the implementation of Good Governance, (4) All independent variables, namely the performance of the Village Government Apparatus and Village Financial Management, are able to explain the Good Governance variable by 22.2% and the remaining 78.8% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: *Performance of Village Government Apparatus, Village Financial Management, Good Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Penerapan Good Governance pada Desa di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kuantitatif. Penelitian dilakukan di 6 desa di Kecamatan Silimakuta. Sampel penelitian ini berjumlah 45 responden yang merupakan keseluruhan aparat desa. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa : (1) Kinerja Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan Good Governance, (2) Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan Good Governance, (3) Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan Good Governance, (4) Seluruh variabel bebas yakni Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Keuangan Desa mampu menjelaskan variabel Good Governance sebesar 22,2% dan sisanya sebesar 78,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Good Governance.*

PENDAHULUAN

Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) ialah “suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi dengan prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis” (Sari, 2017). Pengembangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dibantu oleh tiga faktor: pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pembangunan merupakan syarat untuk terjadinya proses transformasi atau perubahan yang positif di suatu daerah. Kesadaran akan cita-cita manusia yang didorong ke arah kemajuan adalah dasar dari pembangunan. Setiap manusia ingin maju dalam segala bidang kehidupan.

Otonomi desa diperkuat melalui kerangka kerja kelembagaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan otonomi desa yang kuat dan menguntungkan bergantung pada fondasi yang kuat pada nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Aparat pemerintah desa memikul kepercayaan yang sangat besar dalam mengelola terkait keuangan desa karena jumlah dana yang cukup besar yang diberikan kepada mereka. Ada kekhawatiran yang sama pentingnya di balik besarnya jumlah uang yang dikelola desa dan cita-cita dalam mencapai pembangunan desa yang merata.

Berdasarkan prasurvei yang telah dilakukan oleh peneliti, kinerja aparatur pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Silimakuta, Desa Purbatua Etek masih kurang dalam rangka pelaksanaan dan pembangunan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jalan berlubang di beberapa tempat yang sampai pada saat ini masih belum ditangani pemerintah. Namun sekitar 5 tahun yang lalu jalan tersebut pernah diperbaiki, tetapi sekitar 200 meter saja dan itupun tidak sampai kepermukiman yang kini kondisinya kembali memprihatinkan. Sehingga kurang bermanfaat terhadap masyarakat (Armadanews.id, 2020).

Selanjutnya permasalahan yang ditemukan oleh peneliti didalam dana desa bahwa tidak semuanya berjalan sesuai dengan proses pengelolaan dana desa di Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, terkait dengan anggaran dan pemanfaatan uang desa. Data tahun 2019– 2021 di Desa Sinar Baru dan Purba Sinombah mendukung hal tersebut, menunjukkan bahwa mereka memiliki sisa anggaran belanja yang cukup besar setiap tahunnya (Sirait et al., 2022). Hal ini sudah menjadi fenomena dalam penganggaran dana desa.

Bagi Indonesia, merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia merupakan sebuah tujuan yang menantang dan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.

Berdasarkan dengan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Menurut (Aisyah, 2021) Teori Stewardship merupakan “teori yang mengungkapkan bahwa seorang manajer lebih mementingkan tujuan dan sasaran organisasi daripada kepentingan milik pribadinya.” Teori Stewardship mendalilkan hubungan yang erat antara keberhasilan suatu organisasi dengan kesejahteraan pemiliknya. Sehingga teori ini akan melindungi dan juga meningkatkan secara maksimal kekayaan suatu organisasi dengan kinerja perusahaan, serta manajer dapat menyelaraskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik.

Menurut Stewardship Theory, masyarakat yang memiliki sumber daya adalah pihak yang utama, dan pemerintah adalah pengelolanya, yang bertugas mengelola sumber daya tersebut. Pengamplikasian teori stewardship pada kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perwakilan pemerintah di Desa Kecamatan Silimakuta harus bekerja dengan baik agar bisa melayani kepentingan masyarakat.

Penerapan Good Governance

Menurut Sari (2017) Good Governance merupakan “sebuah struktur dalam berbangsa dan bernegara yang pola atas tingkah lakunya didasari oleh prinsip dan ciri tertentu.” Prinsip-prinsip yang

dimaksud yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi, serta kesetaraan. Pemerintahan bisa dinilai baik buruknya apabila pemerintahan tersebut telah bersinggungan atau berkaitan dengan semua unsur prinsip good governance. Memahami pentingnya masalah ini, yang menjadi indikator good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2017) di dalam penelitian diurai menjadi : (a) Partisipasi (b) Tegaknya supremasi hukum (c) Transparansi (d) Berorientasi pada Konsensus (e) Kesetaraan (f) Efektifitas dan Efisiensi (g) Akuntabilitas (h) Responsif. Memahami pentingnya masalah ini menjadikan hal ini sebagai tanda pemerintahan yang sehat.

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa merupakan “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu” (Wuri, 2017). Kinerja pemerintah sangat krusial dalam membenahi serta mengarahkan semua kegiatan agar tercapainya tujuan dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan, Menurut (Lestiawan & Jatmiko, 2015) kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan “kinerja individu atau kelompok dalam rentang waktu yang telah ditentukan.” Saat mengevaluasi suatu organisasi, berbagai indikator kinerja yang digunakan menurut (Ruspina, 2013) yaitu : (a) Indikator masukan (b) Indikator proses (c) Indikator keluaran (d) Indikator hasil (e) Indikator manfaat (f) Indikator dampak.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa didefinisikan sebagai “keseluruhan kegiatan pemerintahan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa” (Raharjo, 2020). Selain itu, menurut (Ruspina, 2013) Pengelolaan keuangan daerah adalah “seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Berdasarkan penjabaran di atas, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh operasional atau sistem pemerintahan yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemerintahan mengenai keuangan desa, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut (Nagor, 2015) prinsip mengenai konsep pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengendalikan peraturan mengenai keuangan daerah dapat dipaparkan sebagai berikut : (a) Akuntabilitas (b) Value for money (c) Pengendalian. Variabel Pengelolaan Keuangan Desa diukur dengan indikator value for money yang terdiri dari : (1) Efisiensi (2) Efektivitas (3) Ekonomi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Penerapan Good Governance

Pencapaian kerja aparatur adalah bentuk kesuksesan atas perolehan dari cita-cita organisasi yang sudah ditentukan, yang menggambarkan kualitas dan jumlah hasil kerja yang diperoleh masing-masing aparatur ketika menjalankan tugasnya. Isu utama dari penyelenggaraan otonomi daerah yakni terlaksanakannya pemerintahan yang baik. Pemerintah dapat membentuk karakteristik yang kuat untuk mewujudkan impian yang diinginkan dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan kinerja aparatur yang baik, responsif, kondusif, dan adaptif. Apalagi jika dikaitkan dengan Stewardship Theory yang lebih mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individu.

Peningkatan kinerja aparat pemerintah desa juga dapat membantu mendorong tata kelola atau administrasi pemerintahan yang efektif. Uraian tersebut juga dirincikan dan konsisten dengan studi yang diungkapkan oleh (Mailoor et al., 2017); (Ruspina, 2013); (R. P. Sari et al., 2023); (Dhiyavani, 2017); dan (Yohana, 2020) yang di dalamnya disebutkan bahwa kinerja pejabat yang bekerja pada pemerintah

daerah mempunyai pengaruh yang baik terhadap terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan fenomena serta riset peneliti sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Kinerja Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Penerapan Good Governance.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Penerapan Good Governance

Sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011) diartikan sebagai “pengelolaan secara keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.” Dalam studi yang diteliti oleh (Ruspina, 2013) menyatakan bahwasanya pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan good governance. Sejak Republik Indonesia memasuki era reformasi, cita-cita baru Indonesia tentang “pemerintahan yang baik” bagi organisasi pemerintah terus digaungkan. Di sisi lainnya, Teori Stewardship juga penting diterapkan dalam mengelola keuangan daerah agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini konsisten dengan studi (W. N. Sari, 2017); (Dhiyavani, 2017); dan (Yohana, 2020) yang juga merincikan bahwasanya pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap penerapan good governance. Berdasarkan fenomena dan riset dari peneliti sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Penerapan Good Governance.

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Penerapan Good Governance

Berdasarkan Teori Stewardship, yang menuturkan bahwa steward selaku pemerintah yang lebih mementingkan tujuan bersama dan akan lebih memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat maka dengan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa serta mengoptimalkan dalam mengelola keuangan desa akan menghasilkan good governance.

Menurut kajian atas beberapa penelitian terdahulu Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa memiliki kaitan yang erat dengan penerapan Good Governance di Indonesia. Uraian sebelumnya konsisten dengan studi dari beberapa peneliti, yaitu : (W. N. Sari, 2017); (Ruspina, 2013); (R. P. Sari et al., 2023); (Dhiyavani, 2017); dan (Yohana, 2020) yang mengatakan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Good Governance.

H3 : Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Penerapan Good Governance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan memfokuskan pada pengumpulan data primer dengan menyebarluaskan angket kepada responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan desa dari total 45 aparatur yang berasal dari 6 desa berbeda yang terletak di wilayah Kabupaten Simalungun Kabupaten Silimakuta. Pengukuran pada kuesioner menggunakan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan analisis tingkat pengembalian kuesioner, menunjukkan bahwa tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak memenuhi syarat, sehingga tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%.

Karakteristik Responden

Berdasarkan analisis demografis responden, membuktikan bahwasanya kebanyakan responden berjenis kelamin pria sebanyak 36 orang (80%), sedangkan sebanyak 9 orang (20%) adalah perempuan. Dari segi masa jabatan, mengungkapkan bahwa mayoritas responden memiliki masa kerja yang dibawah 5 tahun sebanyak 44 aparatur dengan persentase (97%), sementara sebanyak 1 orang dengan persentase (3%) telah bekerja selama 5-15 tahun.

Hasil Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA	45	25	39	35.71	2.370
PENGLOLAAN KEUANGAN DESA	45	34	45	40.47	2.936
GOOD GOVERNANCE	45	40	50	45.20	2.889
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel di atas dengan total data yang diuji 45, dihasilkan kesimpulan bahwa :

1. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (X1) memiliki nilai terendah 25 dan nilai tertinggi 39, dengan nilai mean 35,71;
2. Variabel Pengelolaan Keuangan Desa (X2) memiliki nilai mean 40,47 dengan nilai paling rendah 34 dan nilai paling tinggi 45;
3. Variabel Penerapan Good Governance (Y) memiliki nilai mean 45,20 dengan nilai minimum 40 dan nilai maksimum 50.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Dalam studi ini, penentuan nilai rtabel dapat dilakukan dengan merujuk pada rtabel $n=45$, $df = n-2 = 43$ dan level signifikansi 5% yaitu 0,2940. Nilai koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel kejelasan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa > rtabel 0,2940. Seluruh pernyataan dalam kuesioner dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	0,618	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa	0,750	Reliabel
Good Governance	0,780	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024

Berkaitan dengan tabel di atas nilai Cronbach Alpha melebihi 0,60 dari setiap variabel dalam studi ini maka seluruh instrumen sudah reliabel (konsisten) serta dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.48870562
Most Extreme Differences	Absolute		.092
	Positive		.079
	Negative		-.092
Test Statistic			.092
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.428
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.415
		Upper Bound	.440

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

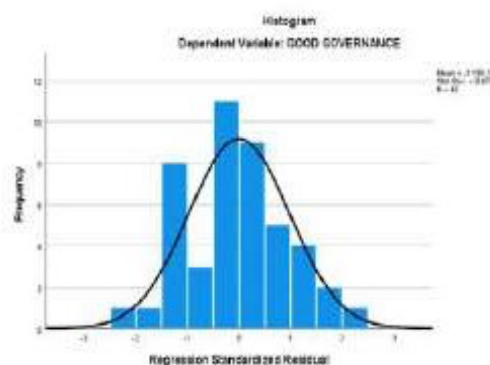
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

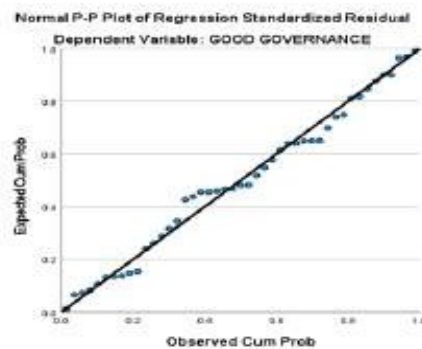
Mengacu pada analisis normalitas yang terpapar dalam tabel menerangkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu senilai 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka ditarik hasil bahwasanya data sudah berdistribusi normal.



Gambar 1. Histogram

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Ditinjau dari grafik histogram diatas disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena menampilkan garis lengkung yang berupa lonceng dan tidak berbelok ke kiri atau ke kanan.



Gambar 2. Normal P-P Plot

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Mengamati titik-titik data tersebar sepanjang garis diagonal pada gambar grafik plot probabilitas normal, maka model regresi dapat dipakai karena memenuhi persyaratan normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

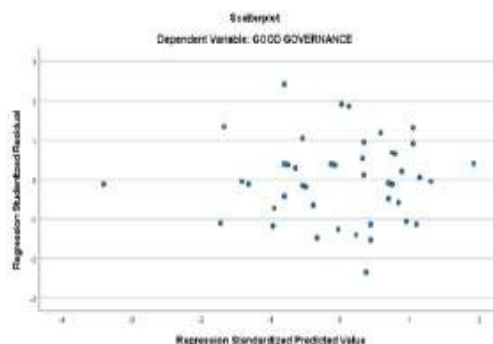
Model	Coefficients ^a		Standard ized Coeffi ents	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Std. Error				Tolerance	VIF
1. (Constant)	13.846	8.233		1.682	.100		
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA	.450	.163	.369	2.764	.008	.992	1.008
PENGELOLAA N KEUANGAN DESA	.378	.131	.384	2.878	.006	.992	1.008

a. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Ditinjau dari tabel dapat disimpulkan bahwa tiada indikasi gejala multikolinearitas di antara variabel independent karena nilai VIF untuk setiap variabel independen < 10 dan nilai Tolerance > 0.1

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Menilik hasil uji heteroskedastisitas dapat dikatakan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas karena sebaran titik di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola yang terlihat.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	13.846	8.233		1.682	.100	
	KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA	.450	.163	.369	2.764	.008	.992 1.008
	PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	.378	.131	.384	2.878	.006	.992 1.008

a. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS27, 2024

Mengacu pada hasil tabel diatas, diketahui persamaan regresi linear bergandanya, yaitu : $GG = 13,846 + 0,450KAPD + 0,378PKD$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^{a,b}				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.222	2.547

a. Predictors: (Constant), PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

b. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,222 artinya variabel terikat yaitu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dijelaskan atau dijelaskan sebesar 0,222 atau 22,2% dari variabel bebas yaitu kinerja aparatur pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. Namun, unsur lain yang tidak terliput dalam model pengkajian ini menjelaskan 77,8% lainnya.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94.679	2	47.340	7.296	.002 ^b
	Residual	272.521	42	6.489		
	Total	367.200	44			

a. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

b. Predictors: (Constant), PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Terlihat bahwasanya hasil dari uji F memperlihatkan nilai signifikan sebesar 0,002 artinya kurang dari 0,05. Hal ini menandakan temuan uji F menunjukkan penerapan good governance secara simultan dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja pengelolaan keuangan desa dan kinerja aparatur pemerintah.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.846	8.233		1.682	.100		
	KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA	.450	.163	.369	2.764	.008	.992	1.008
	PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	.378	.131	.384	2.878	.006	.992	1.008

a. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 27, 2024

Didapatkan nilai t tabel = 2,018

1. Berdasarkan pengujian t pada Kinerja Aparatur Pemerintah Desa diperoleh hasil thitung sebesar 2,764 dengan angka signifikansi 0,008. Perolehan angka signifikansi pada variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dapat dilihat nilai di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%. Dan untuk thitung $2,764 > t_{\text{tabel}} 2,018$ sehingga disimpulkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa secara parsial memiliki dampak positif signifikan terhadap Penerapan Good Governance.
2. Berdasarkan pengujian t pada Pengelolaan Keuangan Desa diperoleh hasil thitung sebesar 2,878 dengan angka signifikansi 0,006. Perolehan angka signifikansi pada variabel Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilihat nilai di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%. Dan untuk thitung $2,878 > t_{\text{tabel}} 2,018$ sehingga disimpulkan Pengelolaan Keuangan Desa secara parsial memiliki dampak positif signifikan terhadap Penerapan Good Governance.

Pembahasan

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Penerapan Good Governance

Hasil peninjauan dalam studi ini menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Desa secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance di 6 desa yang berada di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun. Dimana hasil pengujian menunjukkan thitung $> t_{\text{tabel}}$ yaitu $2,764 > 2,018$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansinya ($0,008 < 0,05$). Berdasarkan temuan ini, H1 disetujui.

Penelitian yang tersebut diatas konsisten dengan hasil studi yang dilaksanakan oleh (W. N. Sari, 2017) berpengaruh positif dan signifikan, yang menerangkan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa yang berjalan dengan efektif dan efisien akan meningkatkan serta memperbaiki kualitas kinerja secara optimal, dan membawa dampak yang baik terhadap Penerapan Good Governance.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Penerapan Good Governance

Hasil pengujian studi menjelaskan bahwa, di 6 desa di Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh signifikan dan parsial terhadap Penerapan Good

Governance. Dimana pengujian memperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,878 > 2,018$ dengan nilai signifikan kurang dari taraf signifikansinya ($0,006 < 0,05$). Dengan hasil tersebut maka H_2 diterima. Penelitian ini konsisten diungkapkan oleh (R. P. Sari et al., 2023) yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah akan memberikan evaluasi seperti penyajian laporan keuangan agar menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Good Governance. Hal ini mempunyai dampak yang baik dan patut diperhatikan.

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Penerapan Good Governance

Hasil pengujian yang ketiga menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $7,296 > 3,22$ dan nilai signifikansi F ($0,002 < 0,05$) maka H_3 disetujui. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.
2. Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.
3. Secara Simultan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.
4. Good Governance sebesar 22,2% dapat dijelaskan oleh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dan sisanya 77,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Usulan untuk pemerintah desa yaitu agar terus menjaga integritas organisasi, meningkatkan dan memperluas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur desa supaya mampu mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi guna mengatasi tantangan dunia global. Disarankan agar variabel-variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi penerapan tata pemerintahan yang baik di berbagai desa dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Variabel independen tambahan meliputi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (2021). Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Majalah Media Perencanaan*, 2(1), 145–152.
- Armadanews.id. (2020). *Jalan Rusak Menuju Purba Tua Etek Kondisinya Bagaiakan Kubangan Kerbau*. Armada News.
- Dhiyavani, S. I. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. *Jom Fekon*, 4(1), 1859–1872.
- Lestiawan, H. Y., & Jatmiko, B. (2015). Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Maksimum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.26714/mki.5.1.2015.32-49>
- Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing (Goodwill)*, 8(2), 82–94.
- Nagor, T. F. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Studi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Magister Akuntansi*, 4(1), 72–79.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 21 (2011).
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta Timur : PT Bumi Aksara.
- Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi empiris pada Pemerintah Kota Padang). In *Jurnal Akuntansi* (Issue 3). Universitas Negeri Padang.
- Sari, R. P., Rice Haryati, & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 183–192. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.852>
- Sari, W. N. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *JOM Fekon*, 4(1), 896–910. <http://www.menpan.go.id>
- Sirait, S. A., Gaol, R. L., & Parhusip, P. T. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Silimakuta. *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi (SMA)*, 1(1), 249–259.
- UNDP (2017). *Decentralization : A Sampling of Definitions*. Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance
- Wuri, R. R. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 107–115.
- Yohana, V. B. (2020). *Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan)*. Universitas Wijaya Putra.